

## BAB IV

### PENUTUP

#### 15. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

**Pertama, bahwa metode penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilakukan:**

- a. Pendidikan Dasar, dapat dilakukan melalui: metode demokrasi untuk menanamkan nilai-nilai hidup secara benar dan jujur, metode pencarian bersama untuk menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, metode keteladanan untuk membentuk sikap memiliki ketulusan dan keteguhan, metode Live In yang lebih menekankan pengalaman langsung anak untuk dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda sehingga tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi.
- b. Pendidikan Menengah, dapat dilakukan melalui: model pembelajaran sosial reconstruction agar kooperatif dan kolaboratif, model pendidikan antikorupsi yang menyeimbangkan keselarasan aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik, pembelajaran tematik anti korupsi dapat lebih efisien, metode pendidikan terintegrasi , melalui mata pelajaran atau program ekstrakurikuler khusus dengan memasukkan karakter.
- c. Pendidikan Tinggi, dapat dilakukan melalui: integrasi nilai dan etika, internalisasi nilai positif, pembiasaan dan latihan, pemberian contoh dan teladan, penciptaan suasana berkarakter di kampus.

**Kedua, bahwa strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan agar dapat meningkatkan ketahanan nasional dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat dilakukan:**

- a. Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah melalui: penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, Strategi integrasi dalam mata pelajaran dengan memasukkan konten lokal, partisipasi masyarakat. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah perlu melibatkan

seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat dengan membuat komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi

- b. Jenjang Pendidikan Tinggi melalui: orientasi pendidikan tinggi pada budaya dan perilaku (karakter), pemahaman dan contoh praktek korupsi dan konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku korupsi, kepekaan terhadap praktek-praktek korupsi yang terjadi secara nyata, mendidik perilaku anti korupsi sesuai ajaran-ajaran sosial dan keagamaan, mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam 8 (delapan) bentuk kegiatan kampus merdeka-merdeka belajar pada program magang bersertifikat maupun KKN di desa.

**Ketiga, bahwa budaya anti korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan ketahanan nasional, dimana masyarakat yang cenderung berperilaku anti korupsi akan menyebabkan secara signifikan berkurangnya tingkat perilaku korupsi atau angka korupsi.**

Hubungan budaya anti korupsi yang dapat meningkatkan ketahanan nasional antara lain dipengaruhi antara lain hal-hal sebagai berikut: kesadaran masyarakat dan individu, kesadaran generasi muda akan dampak negatif dari korupsi pada jangka panjang, praktik politik kekuasaan yang dicapai dengan cara tanpa adanya praktik korupsi, praktik ekonomi yang tidak KKN.

Adapun yang menghambat pemberantasan korupsi termasuk juga pencegahan korupsi sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: hambatan structural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, hambatan kultural yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, hambatan Instrumental yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hambatan manajemen, yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## 16. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan meliputi:

- a. Perlunya Kebijakan Mendikbudristek sebagai implementasi pendidikan karakter sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter kedalam kurikulum nasional pada semua jenjang pendidikan;
- b. Perlunya penyiapan rencana aksi nasional tentang nilai anti korupsi sebagai implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada semua jenjang pendidikan dengan koordinasi antara Kemendikbudristek dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pendidikan terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi oleh Kemendikbudristek dengan berkoordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Penulis,



Prof. Dr. Agus Surono., S.H., M.H.

Guru Besar Ilmu Hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Rineka Cipta.
- David J. Gerber. 2001. *Globalization and knowledge: Implications for Comparative Law*, 75 Tul. LRev. 949.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.
- John C. Reitz. 1998. *How To Do Comparative Law*, 46 Am. J Comp. L 617,
- KPK. 2006. *Modul I – Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar*.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: PT. Alumni.
- Matthew S Roalf. 2004. *A Sheep in Wolf's Clothing: Why The Debate Surrounding Comparative Constitutional Law Is Spectacularly Ordinary*, 73 Fordham . Rev 1239.
- Mahfud MD. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Miles. Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Paton, Michael Quinn. 1989. *Qualitative Evaluation Methods*. London and New Delhi: Sage Publication, Inc.
- RB. Soemanto, dkk. 2014. *Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi*, Jurnal Yustisia, Vol. 88, April.
- Rasul, Sjahrussin. 2006. *Dalam Makalah KPK dalam Seminar Nasional tanggal 13 September 2006*.
- Sunaryati Hartono. 2016. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 2., Bandung: Alumni.
- Susetyo, Benny. 2004. *Hancurnya Etika Politik*. Jakarta: Buku Kompas.
- Syam, M.Noor.dkk. 1987. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Tranformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Cet. 1, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Azeem Marhendra Amedi, Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), *Padjadjaran Law Review*, Volume 6, Desember 2018., P-ISSN: 2407-6546.
- Ade Imelda Firmayanti, Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam, *Al Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No. 1 . 2017., P.ISSN: 20869118.
- Dwi Puji Lestari, Peningkatan Perilaku Anti Korupsi Melalui Metode Story Telling, *Al-Athfal Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2018., ISSN: 2477-4715.
- Erry Trisna Nurhayana, Kotak Temuan: Media Aktualisasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa di Sekolah Dasar, *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 1 Nomor 1 April 2017., ISSN: 2527-5445.
- Eko Handoyo, dkk, Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang, *Jurnal Abdimas*, Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang as the application of science communication technology, sports, culture, and arts in empowering the community., Vol. 14. Nomor 2., 2010, p-ISSN: 1410-2765 | e-ISSN 2503-1252.

Ginanjar Hambali, Evaluasi Program Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 6, Nomor 1, e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977.

Hayyan Ahmad Ulul Albab, Membasmi Koruptor Sejak Usia Dini: Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Anti Korupsi di Madrasah, Proceedings of The 4<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Early Chilhood Education, Faculty of Tarbiyah and teaching Science, State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol 4, Desember 2019, ISSN (e-ISSN): 2548-4516.

Herry Widystono, Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Jurnal Teknодик Vol. 17, Nomor 2, Juni 2013.

I Putu Andre Suhardiana, Membangun Tunas Integritas Sebagai Cikal Generasi Antikorupsi di Tingkat Pendidikan Dasar, Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2017, ISSN: 2527-5445.

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, dkk, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korutif Melalui Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2018, ISSN: 2502-89601 e-ISSN: 2502-7573.

Nuzus, dkk, Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini, El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education, Vol. 2, Nomor 1, April 2019, p-ISSN: 2620-3251.

Mufarizudin, dkk, Pelatihan Desiminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi bagi Pengurus Organisasi Intra Kampus, Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM), Vol. 5, Nomor 3, Juni 2021, e-ISSN 2614-5758.

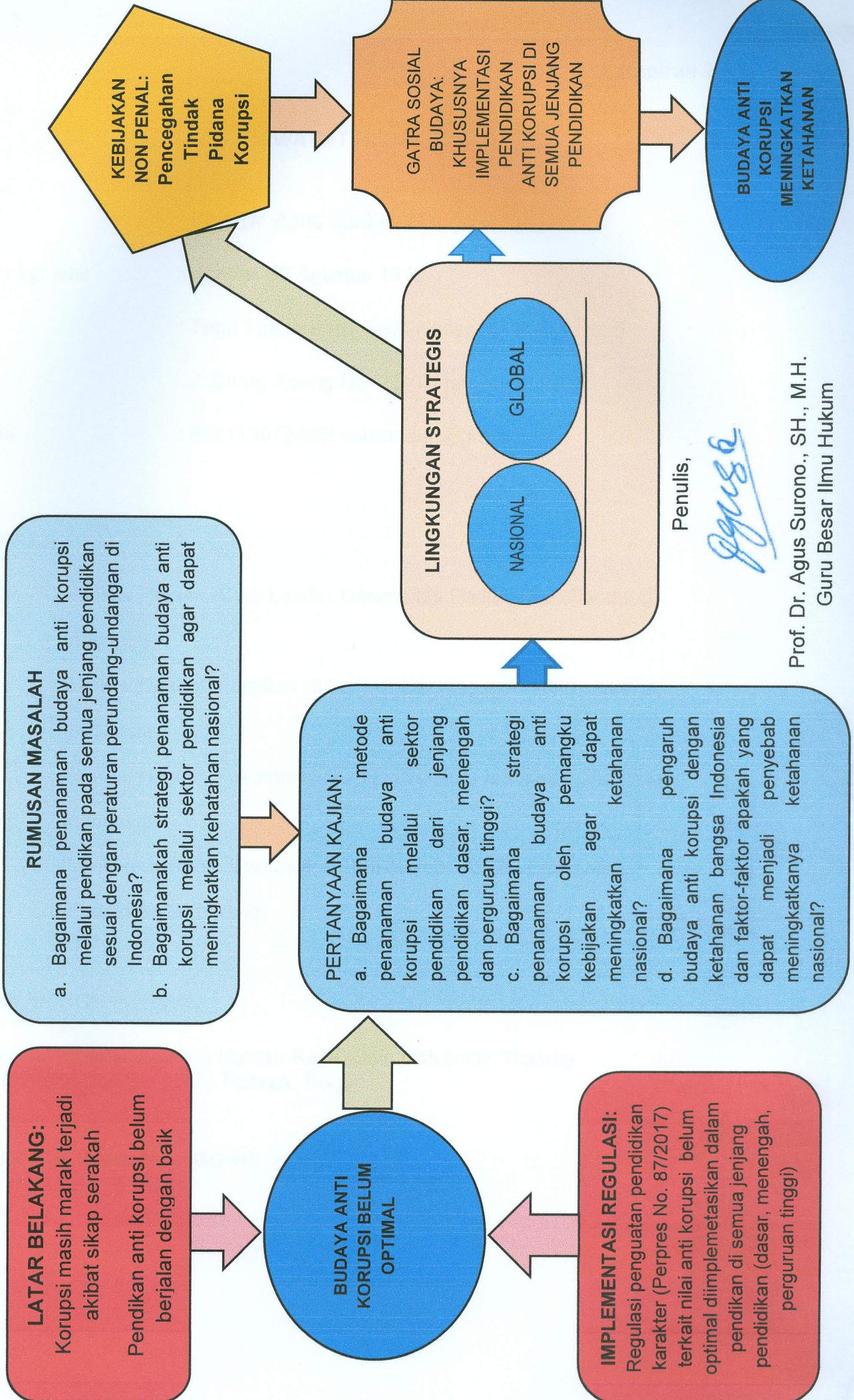
Nidhaul Khusna, Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi, Mudarissa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2016.

Nurdyansyah, Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pare, Halaqa: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 14, Nomor 1, April 2015, ISSN: 2579-5813.

Yusrianto Kadir, Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi, Gorontalo Law Review, Vol. 1, Nomor 1, April 2018, p-ISSN: 2614-5030.



## ALUR PIKIR PENANAMAN BUDAYA ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL



Penulis,

*Agus S.*

Prof. Dr. Agus Surono., SH., M.H.  
Guru Besar Ilmu Hukum

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH  
Tempat / Tgl lahir : Kendal, 30 Agustus 1970  
Alamat : Tugu Tanah Baru Town House Blok C-1 No. 5  
Jl.Curug Agung No. 27, Tanah Baru Depok  
Tlp/Email : 082113072425/ surono.uai@gmail.com

### PENDIDIKAN :

2008 : S3 Ilmu Hukum (Cum Laude) Universitas Padjadjaran Bandung,  
Indonesia  
2001 : S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,  
Indonesia  
1998 : S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,  
Indonesia.  
1992 : DIII Tehnik Radiodiganostik & Radioterapi, APRO Semarang  
(Poltekkes Semarang).

### PENDIDIKAN NON FORMAL :

- Peace Transformation & Human Right, Oslo University, Norway.
- Research Design, DIKTI, Puncak, Bogor.

**PENGUASAAN BAHASA INGGRIS:** Aktif

**PENGALAMAN PEKERJAAN SEBAGAI TENAGA AHLI :**

a. Nama Proyek	:	Studi Fungsi Sosial Tanah
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Sebagai nara sumber dan tenaga ahli hukum pertanahan
f. Waktu Pelaksanaan	:	July - November 2009
g. Posisi Penugasan	:	Land Law Expert
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

a. Nama Proyek	:	Adat Land
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Bertanggung jawab pada pelaksanaan seluruh proyek, yang terkait dengan kegiatan penyusunan Regional Land Strategic Issue
f. Waktu Pelaksanaan	:	July -October 2009
g. Posisi Penugasan	:	Team Leader
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

**PENGALAMAN PEKERJAAN SEBAGAI TENAGA AHLI :**

a. Nama Proyek	:	Studi Fungsi Sosial Tanah
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Sebagai nara sumber dan tenaga ahli hukum pertanahan
f. Waktu Pelaksanaan	:	July - November 2009
g. Posisi Penugasan	:	Land Law Expert
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

a. Nama Proyek	:	Adat Land
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Bertanggung jawab pada pelaksanaan seluruh proyek, yang terkait dengan kegiatan penyusunan Regional Land Strategic Issue
f. Waktu Pelaksanaan	:	July -October 2009
g. Posisi Penugasan	:	Team Leader
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

a. Nama Proyek	:	Resi Gudang Management
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Bapepti
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Analisa dan telaah Legal Aspek, Study of Resi Gudang Management.
f. Waktu Pelaksanaan	:	November 2008-January 2009
g. Posisi Penugasan	:	Legal Expert
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

a. Nama Proyek	:	Land Strategic Issue
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Bertanggung jawab pada pelaksanaan seluruh proyek, yang terkait dengan kegiatan penyusunan Regional Land Strategic Issue
f. Waktu Pelaksanaan	:	October 2008-Desember 2008
g. Posisi Penugasan	:	Team Leader
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

a. Nama Proyek	:	Land Management and Policy Development Project (LMPDP) Component I – BAPPENAS
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Land Law Expert, Study of Distribution of State Land
f. Waktu Pelaksanaan	:	February 2008-October 2008
g. Posisi Penugasan	:	Legal Expert
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		

a. Nama Proyek	:	GreenLaw Indonesia
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Menjadi nara sumber dan tenaga ahli peneliti senior
f. Waktu Pelaksanaan	:	January 2005-Dec 2006
g. Posisi Penugasan	:	Senior Advisor and Senior Researcher
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		
a. Nama Proyek	:	Colaborative Management on Conflict at National Park
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta

c. Pengguna Jasa	:	Badan Pertanahan Nasional
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Assist the Central Government and the Leuser National Park with implementation of collaborative conflict management.
f. Waktu Pelaksanaan	:	February 2005-October 2005
g. Posisi Penugasan	:	Legal Expert
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		
a. Nama Proyek	:	Kajian Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan
b. Lokasi Proyek	:	NTT, Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat
c. Pengguna Jasa	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Melakukan kajian dari aspek Kebijakan Publik
f. Waktu Pelaksanaan	:	Juli-Desember 2011
g. Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Kebijakan Publik
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan: - i. Surat Referensi : -		
a. Nama Proyek	:	Kajian Pengaturan Pengusahaan LNG
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Ditjen Migas
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Menyusun Naskah Akademik dan Menyusun Draft Peraturan Menteri tentang Pengusahaan LNG.
f. Waktu Pelaksanaan	:	September-Desember 2011

g. Posisi Penugasan	:	Legal Expert
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan:	- i.	Surat Referensi : -

a. Nama Proyek	:	Kajian Penyusunan Peraturan Menteri Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
b. Lokasi Proyek	:	Jakarta
c. Pengguna Jasa	:	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Uraian Tugas	:	Meriview dan menyusun draft peraturan Menteri tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Mengkoordinasikan hasil analisis dari para tenaga ahli
f. Waktu Pelaksanaan	:	Maret 2011-Juni 2011
g. Posisi Penugasan	:	Team Leader
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan:	- i.	Surat Referensi : -

#### PENGALAMAN KERJA SEBAGAI TENAGA PENGAJAR:

1. Badiklat Cinere Gandul, Kementerian HAM : Februari 2005 – sekarang
2. Kementerian DalamNegeri : Februari 2007 – sekarang
3. Universitas Al Azhar, Jakarta : 2001 – sekarang,
4. Universitas Nasional, Jakarta : 2001 – 2006
5. Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta : August 2000- January 2005
6. Universitas Islam Riau (Program Magister Ilmu Hukum), Riau : February 2008- sekarang, sebagai Dosen Luar Biasa
7. Universitas Muhammadiyah (Program Magister Ilmu Hukum), Palembang : February 2008- sekarang, sebagai Dosen Luar Biasa
8. Universitas Muhammadiyah (Program Magister Ilmu Hukum), Sumatera Utara: Februari 2009-Sekarang, sebagai Dosen Luar Biasa

9. Universitas Djuanda (Program Magister Ilmu Hukum), Bogor, 2011-Sekarang
10. Universitas Pancasila, Jakarta, sampai sekarang sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.

#### **PENGALAMAN BIROKRASI:**

1. Sekretariat Negara RI (BLU-Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Satker Sekneg), Kepala Divisi Hukum dan Humas: September 2009-Desember 2010
2. Staf Ahli Bidang Hukum, Dirut TMII, September 2019- Mei 2020.
3. Staf Ahli Dewan Pengawas BLU PPKKemayoran, Satker Sekneg RI, 2018-2019.

#### **PENGALAMAN STRUKTURAL DI PENDIDIKAN**

1. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2002-2009
2. Sekretaris Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Assyafiiyah, Februari 2010-Desember 2010
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2013-2017
4. Wakil Rektor I Universitas Al Azhar Indonesia, 2017-2021
5. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, sampai sekarang.

#### **PENGALAMAN MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI**

1. Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Tengah, Perkara Gugatan PMH, Ahli Hukum Pertanahan, 2011
2. Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Perkara Gugatan PMH, Ahli Hukum Pertanahan, 2013
3. PTUN Denpasar, Bali, Perkara Gugatan TUN, Ahli Hukum Kehutanan, 2013
4. PTUN, Pangkal Pinang, Batam, Perkara Gugatan TUN, Ahli Hukum Kehutanan, 2014
5. Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara Gugatan PMH, Ahli Hukum Pertanahan, 2015
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Gugatan TUN, Ahli Hukum Pertanahan, 2016
7. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gugatan Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Ahli Hukum Pertanahan, 2016
8. Pengadilan Negeri Tangerang, Gugatan Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Ahli Hukum Pertanahan, 2017

9. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Gugatan TUN, Ahli Hukum Pertanahan, 2017
10. Pengadilan Negeri Bangkinang, Gugatan PMH, Ahli Hukum Pertanahan, 2018
11. Pengadilan Tipikor Jakarta, Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2020.
12. Pengadilan Negeri Papua, Gugatan Praperadilan, 2020.
13. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gugatan Praperadilan, 2021.
14. Pengadilan Tipikor Jakarta, Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2021.
15. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Perkara Tindak Pidana Terkait UU Kekerantinaan Kesehatan dan UU Penyakit Wabah Menular, 2021.
16. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gugatan Praperadilan, 2021.

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Himpunan Pelajar Muhammadiyah, Kabupaten Kendal, 1990-1991
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Ekstension Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996-1997
3. Anggota HMI Korwil Kampus UI Depok, 1995-1997
4. Anggota Bidang Hukum, Himpunan Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, 2001-2002
5. Anggota ICMI 1999-2002
6. Dewan Pakar, NU Kabupaten Kendal, 2019-2020.

## TRAINING dan WORKSHOP

- Pendidikan Advokat (PKPA) pada Tahun 2011 dan telah lulus Ujian Advokat (Peradi) pada Tahun 2011
- Workshop Legal Drafting, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Desember, 2008
- Workshop Contract Drafting, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Desember, 2007
- Workshop Environmental Law, Facultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Juli 2007
- Advance on Ecosocial Rights and Environmental Law, University of Islam Indonesia Centre Human Rights, Mei, 2007
- Workshop on Agrarian Reform and Natural Resources Law, HuMa (Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Mei, 2006
- Workshop on Environmental Law, Peace Transformation and Human Rights, held by Norwegian Centre Human Rights (NCHR), Norway, June, 2005

## PUBLIKASI

1. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit, Universitas Al Azhar, 2017.
2. Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi, Universitas Al azhar, 2018.
3. Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Universitas Al Azhar, 2019.
4. Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa, Universitas Al Azhar, 2017.

5. Kajian Hukum Terhadap Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hak Desa Atas Sumber Daya Alam, Universitas Al Azhar, 2018.
6. Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2008.
7. Isu-Isu Strategis Pertanahan di Sumatera, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2009.
8. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2009.
9. Gugatan 5 Bupati Kalteng, Putusan MK Harus Dipatuhi, Suara Pembaharuan, Kamis 15 Maret 2012
- 10.5 Bupati Desak Menhut Laksanakan Putusan MK Soal Hutan di Kalteng, Rakyat Merdeka, Kamis 15 Maret 2012
11. Otonomi Daerah Hormati Putusan MK, Suara Karya, Kamis 15 Maret 2012
12. Lima Bupati Minta Putusan MK Dilaksanakan, Republika, Kamis 15 Maret 2012.
13. Kasus Angie Korupsi Korporasi, Indopos, Jawa Post Jakarta, Senin 30 April 2012.
14. Dorong Angie Jadi Whistle Blower, Indopos, Jawa Post Jakarta, Selasa 1 Mei 2012
15. Hospital Responsibility on Medical malpractice, Jurnal Keadilan, 2001.
16. Fighting Corruption Without Useless Prevention, Jurnal Keadilan, Vol. 1, No.3, 2001.
17. Law harmonization in The Political Perspective of National Law Development, Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 5, 2001.
18. Looking for Indonesian National Law System, Jurnal Keadilan, Vol. 2, No. 1, 2002.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Penulis



Prof. Dr. Agus Surono., SH., MH